RINGKASAN EKSEKUTIF

Pertemuan Tahunan Pengelolaan Energi Nasional

Tahun 2011

Pertemuan Tahunan Pengelolaan Energi Nasional merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan dan perencanaan energi nasional, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi berbagai *stakeholder* sektor energi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan energi dan kebijakan lintas sektor yang terkait.

Pertemuan Tahunan Pengelolaan Energi Nasional tahun 2011 terdiri dari kegiatan seminar dan pameran bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta. Kegiatan seminar dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2011, dan pameran pada hari Selasa s.d Rabu, tanggal 25 s.d 26 Oktober 2011. Pertemuan Tahunan Tahun 2011 mengambil tema “Peningkatan Peran Potensi Energi Daerah Dalam Pertumbuhan Ekonomi”, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011 bersamaan dengan pembukaan Seminar Nasional CASINDO.

Acara ini dihadiri sekitar 200 peserta, perwakilan dari Dirjen Migas, Dirjen Minerba, Dirjen EBTKE, Staf Khusus Menteri, Anggota Komite Dewan Energi Nasional, Pejabat Eselon II dilingkungan KESDM maupun diluar KESDM, Pejabat Dinas Pertambangan dan Energi, Pejabat dari *stakeholder* sektor ESDM, Asosiasi, Praktisi energi, Akademisi dan media massa. Narasumber yang hadir yaitu Dinas ESDM Prov. Jawa Barat, Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta, Dinas ESDM Prov. Sumatera Selatan, PT Adaro Indonesia, PT Navigat Organic Energy Indonesia, *Surfactant & Bioenergy Research Center* (SRBC), dan Puslitbang Tekmira.

Beberapa kesimpulan dari diskusi interaktif yang dilakukan antara lain :

1. Dalam rangka mengembangkan energi panas bumi diperlukan adanya koordinasi antar instansi terkait baik pusat, daerah, kementerian maupun sektor perbankan, sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang sering terjadi seperti tumpang tindih lahan pertambangan panas bumi dengan perkebunan/kehutanan, insentif bagi industri panas bumi baik hulu maupun hilir (PLTP), rendahnya dukungan perbankan dalam tahap eksplorasi panas bumi, dan harga listrik panas bumi yang belum mencapai keekonomian.

2. PLT Sampah sangat potensial untuk dikembangkan karena dapat menjadi sumber energi alternatif bagi pembangkit listrik sehingga dapat menunjang kebutuhan listrik daerah setempat, potensinya sangat besar terutama di kota-kota besar, membuka kesempatan kerja, serta membantu Pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah sampah perkotaan.
3. Pengembangan sampah menjadi tenaga listrik memerlukan biaya investasi yang cukup besar sehingga masih memerlukan dukungan dari Pemerintah baik dari sisi regulasi maupun insentif fiskal.
4. Untuk pengadaan kendaraan (mobil) yang berbahan bakar gas disarankan agar menggunakan BBG secara *full* atau *dedicated system*, serta pengadaan konverter kit yang berkualitas, bengkel BBG, dan instalatur yang handal dan bersertifikat.
5. Untuk meningkatkan pemanfatan BBG di sektor transportasi maka perlu pengenaan sanksi pencabutan konverter kit terhadap kendaraan umum yang tidak melakukan pengisian BBG, peningkatan jumlah SPBG, penerapan tata niaga dan alokasi gas serta mekanisme subsidi, pemberian insentif bagi swasta pengembang infrastruktur BBG, serta sosialisasi pemanfaatan BBG untuk transportasi secara terus-menerus ke seluruh lapisan masyarakat akan tatacara pemakaian yang aman.
6. Program LPG 3 kg yang telah dievaluasi dapat digunakan sebagai *platform* bagi pengembangan program BBG.
7. Perlu komunikasi dan koordinasi para pemangku kepentingan dalam mengatasi tantangan dan hambatan pengembangan energi alternatif antara lain harga energi fosil yang masih subsidi sehingga harga energi baru terbarukan belum mampu bersaing, kebijakan tata niaga dari hulu sampai hilir terkadang menyulitkan investor, serta pengembangan teknologi dan implementasinya.